

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 /SEOJK.03/2021
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712), selanjutnya disebut POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, diperlukan penyesuaian atas cakupan, format, dan tata cara pelaporan Rencana Bisnis BPR yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat. Adapun penyesuaian atas cakupan, format, dan tata cara pelaporan Rencana Bisnis BPR adalah sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka mencapai tujuan usaha sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPR perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR serta prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara realistis, komprehensif, dan mempertimbangkan potensi risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPR.
2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

3. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dalam jangka panjang meliputi visi dan misi BPR.
Yang dimaksud dengan “jangka pendek” adalah untuk periode 1 (satu) tahun.
Yang dimaksud dengan “jangka menengah” adalah untuk periode 3 (tiga) tahun.
Yang dimaksud dengan “jangka panjang” adalah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Dengan mempertimbangkan kondisi permodalan industri BPR, jangka waktu proyeksi dan perencanaan beberapa cakupan materi dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR dibedakan berdasarkan modal inti, yaitu:
 - a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
5. Perhitungan hari yang dimaksud dalam POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS terkait penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis adalah hari kalender.
6. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPR mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi serta hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai dengan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. Ringkasan Eksekutif
Bagian ini paling sedikit memuat visi dan misi BPR yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, rencana dan langkah strategi yang akan ditempuh oleh BPR yang dijelaskan untuk periode

jangka pendek dan jangka menengah, indikator keuangan utama, serta target jangka pendek dan jangka menengah.

b. Strategi Bisnis dan Kebijakan

Bagian ini paling sedikit memuat:

- 1) rencana jangka pendek mengenai analisis posisi BPR dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi, kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR, strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit, dan strategi penyelesaian permasalahan strategis dan/atau pemenuhan ketentuan BPR; dan
- 2) rencana jangka pendek dan jangka menengah mengenai arah kebijakan BPR.

c. Proyeksi Laporan Keuangan

Bagian ini paling sedikit memuat proyeksi laporan posisi keuangan, proyeksi laba rugi, dan proyeksi rekening administratif, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan, sedangkan BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

d. Target Rasio dan Pos Keuangan

Bagian ini paling sedikit memuat target rasio keuangan pokok dan target rasio pos tertentu lainnya, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan target sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan, sedangkan BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan target sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

e. Rencana Penghimpunan Dana

Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek mengenai rencana penghimpunan dana pihak ketiga dan rencana penghimpunan dana lainnya.

- f. Rencana Penyaluran Dana
Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek mengenai rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit, rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan, dan rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha.
- g. Rencana Permodalan
Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek dan jangka menengah mengenai rencana perubahan atau penambahan modal disetor, modal sumbangan, dan/atau revaluasi aset tetap.
- h. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek mengenai rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar dan rencana pengembangan sumber daya manusia yang paling sedikit memuat rencana rekrutmen sumber daya manusia, rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
- i. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru
Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek mengenai pelaksanaan kegiatan usaha yang memenuhi kategori produk baru sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan produk BPR dan BPRS.
- j. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek mengenai rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang, rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor cabang, dan rencana perubahan status jaringan kantor.
- k. Informasi Lainnya
Bagian ini paling sedikit memuat informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR antara lain rencana penghentian kegiatan usaha, produk, atau aktivitas yang berdampak material terhadap kinerja keuangan atau profil risiko BPR, termasuk informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis.

2. Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat minimum sehingga BPR dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan butir I.1.
3. Penyusunan Rencana Bisnis mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang telah disampaikan oleh BPR, antara lain:
 - a. target atau program kerja yang disampaikan dalam Rencana Bisnis BPR dinilai dapat memengaruhi atau membahayakan kelangsungan kegiatan usaha BPR; dan/atau
 - b. Rencana Bisnis yang disampaikan BPR belum memuat atau mengakomodasi hal strategis yang ditetapkan karena kebijakan pengaturan perbankan, kebijakan atau program pemerintah, atau hal strategis lain.
2. BPR dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR, sebagai berikut:
 - a. faktor eksternal antara lain kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, persaingan dengan lembaga jasa keuangan atau entitas lain, serta perkembangan teknologi informasi. Sebagai contoh:
 - 1) Penurunan pertumbuhan ekonomi daerah yang menyebabkan permintaan kredit pada sektor perdagangan yang menjadi prioritas penyaluran kredit BPR mengalami penurunan sehingga dapat memengaruhi kemampuan membayar debitur di sektor tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, BPR dapat mengubah prioritas penyaluran kredit pada sektor lainnya.

- 2) Terdapat peraturan atau program pemerintah terkait dengan kebijakan penyaluran kredit melalui BPR.
 - 3) Terdapat bencana alam, nonalam, atau sosial yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian sehingga memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan.
- b. faktor internal antara lain kondisi keuangan, manajemen dan sumber daya manusia, serta kemampuan infrastruktur lainnya termasuk teknologi informasi. Sebagai contoh:
- 1) BPR mengalami pemburukan kinerja keuangan yang berakibat pada permasalahan permodalan.
 - 2) Terjadi perubahan kepengurusan dan/atau pengendalian BPR yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi bisnis BPR.
 - 3) Terdapat rencana penyelenggaraan produk baru yang dapat mendukung pengembangan usaha BPR namun belum termuat dalam Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR.
- c. faktor eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinilai BPR berdampak material terhadap kegiatan operasional dan/atau kondisi keuangan, yang antara lain tercermin dari laporan keuangan BPR atau dalam hal memengaruhi kinerja keuangan BPR.

IV. LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai dengan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan BPR secara semesteran, yaitu:
 - a. periode Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. periode Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun selanjutnya.
2. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi;
 - b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi Rencana Bisnis;

- c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi; dan
 - e. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.
3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PELAPORAN

1. Tata cara penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. BPR menyiapkan Rencana Bisnis serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dalam bentuk *text file* (txt) dan/atau *portable document format* (pdf) dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Bisnis dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis.
2. Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 /SEOJK.03/2021

TENTANG

RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS**

DAFTAR ISI

I. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS.....	4
A. Penyusunan Rencana Bisnis oleh Direksi.....	4
1. Ringkasan Eksekutif	4
2. Strategi Bisnis dan Kebijakan	5
3. Proyeksi Laporan Keuangan	7
a. Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan.....	9
b. Format Proyeksi Laba Rugi	14
c. Format Proyeksi Rekening Administratif	22
4. Target Rasio dan Pos Keuangan	24
5. Rencana Penghimpunan Dana	31
6. Rencana Penyaluran Dana	31
a. Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Kredit	32
b. Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	32
c. Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha	33
7. Rencana Permodalan	34
8. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	36
a. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar.....	36
b. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	36
1) Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia.....	37
2) Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.....	37
3) Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya ...	38
9. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru	39
10. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor	41
11. Informasi Lainnya	42
B. Persetujuan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris.....	42
II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS	43

I. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

A. Penyusunan Rencana Bisnis oleh Direksi

Sesuai dengan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis setiap tahun, yang paling sedikit memuat:

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi penjelasan umum mengenai ringkasan Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR yaitu:

a. Visi dan Misi BPR

Visi adalah tujuan yang ingin dicapai BPR dalam jangka menengah atau jangka panjang.

Misi adalah pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan tujuan dari BPR.

Visi dan misi BPR disusun untuk jangka panjang.

b. Rencana dan Langkah Strategis yang Akan Ditempuh oleh BPR

Rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR dijelaskan untuk jangka pendek dan jangka menengah.

c. Indikator Keuangan Utama

Indikator keuangan utama paling sedikit memuat penjelasan mengenai kinerja BPR untuk periode jangka pendek yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

d. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Target jangka pendek adalah target kegiatan usaha BPR selama 1 (satu) tahun ke depan yang paling sedikit memuat penurunan *non-performing loan*, peningkatan fungsi intermediasi, peningkatan efisiensi, serta kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR.

Target jangka menengah adalah target kegiatan usaha BPR selama 3 (tiga) tahun ke depan yang paling sedikit memuat upaya penguatan permodalan.

Penyusunan ringkasan eksekutif sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 01.00
Ringkasan Eksekutif

Nama BPR :
Alamat :
Kota/Kabupaten :

Kolom	Sandi	Uraian
Visi BPR	0111	
Misi BPR	0112	
Rencana dan Langkah Strategi Jangka Pendek	0121	
Rencana dan Langkah Strategi Jangka Menengah	0122	
Indikator Keuangan Utama		
a. Permodalan	0131	
b. Kualitas aset	0132	
c. Rentabilitas	0133	
d. Likuiditas	0134	
e. Lainnya	0139	
Target Jangka Pendek	0141	
Target Jangka Menengah	0142	

2. Strategi Bisnis dan Kebijakan

Bagian ini berisi penjelasan secara kualitatif mengenai:

a. Analisis Posisi BPR dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi

Analisis posisi BPR dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi dijelaskan untuk periode jangka pendek.

Untuk melakukan analisis posisi, BPR dapat menggunakan analisis SWOT yaitu *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman) dalam menghadapi persaingan usaha dengan lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lain, termasuk BPR dan/atau BPRS lain.

Untuk melakukan analisis posisi dalam persaingan usaha berdasarkan lokasi, BPR dapat menggunakan batasan wilayah kabupaten, kota dan/atau provinsi.

b. Arah Kebijakan BPR

Arah kebijakan BPR dijelaskan untuk periode jangka pendek dan jangka menengah meliputi informasi umum kebijakan BPR yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPR di waktu yang akan datang antara lain strategi pengembangan bisnis di era digital, serta rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BPR. Termasuk dalam strategi pengembangan bisnis adalah pengembangan teknologi informasi serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.

c. Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPR

Kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR dijelaskan untuk periode jangka pendek. Penerapan kebijakan manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat, termasuk target penilaian penerapan manajemen risiko dan tata kelola.

d. Strategi Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit

Bagian ini menguraikan penjelasan untuk periode jangka pendek mengenai strategi BPR untuk menghimpun dana dan merealisasikan rencana penyaluran kredit antara lain informasi mengenai target, strategi pemasaran dan penerimaan, serta sumber penghimpunan dana pihak ketiga dan penghimpunan dana lainnya.

e. Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis dan/atau Pemenuhan Ketentuan BPR

Bagian ini memuat penjelasan untuk periode jangka pendek mengenai informasi langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang memengaruhi tingkat kesehatan atau status pengawasan BPR, antara lain langkah penyelesaian kredit bermasalah yang telah atau dapat memengaruhi kinerja atau tingkat kesehatan BPR. Selain itu bagian ini juga

memuat informasi dan langkah strategis BPR dalam rangka pemenuhan ketentuan BPR antara lain pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat dan pemenuhan kewajiban pembentukan satuan kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Penyusunan strategi bisnis dan kebijakan sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 02.00

Strategi Bisnis dan Kebijakan

Kolom	Sandi	Uraian
Analisis Posisi BPR dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi	0210	
Arah Kebijakan BPR	0220	
Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPR	0230	
Strategi Penghimpunan Dana	0241	
Strategi Penyaluran Kredit	0242	
Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPR	0251	
Strategi Pemenuhan Ketentuan BPR	0252	

3. Proyeksi Laporan Keuangan

Bagian ini berisi penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif mengenai proyeksi laporan posisi keuangan, proyeksi laba rugi, dan proyeksi rekening administratif, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi. Laporan posisi keuangan, laba rugi, dan rekening administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

- a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.

Proyeksi laporan keuangan dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
- 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.

- b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi laporan keuangan dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- 4) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Penyusunan proyeksi laporan keuangan sesuai dengan format sebagai berikut:

a. Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

Format 03.10
Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

(dalam satuan rupiah)

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
ASET							
Kas dalam Rupiah	1101010000						
Kas dalam Valuta Asing	1101020000						
Surat Berharga	1102000000						
Penempatan pada Bank Lain	1103010000						
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1103020000						
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	1104010100						
-/- Provisi Belum Diamortisasi	1104010200						
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	1104010300						
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi	1104010400						
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	1104010500						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1104020000						
Agunan yang Diambil Alih (AYDA)	1201000000						
Aset Tetap dan Inventaris	1202010000						
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1202020000						
Aset Tidak Berwujud	1203010000						
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	1203020000						
Aset Antarkantor	1204000000						
Aset Lainnya	1299000000						
Total Aset	1000000000						
LIABILITAS							
Liabilitas Segera	2101000000						
Simpanan							
a. Tabungan	2102010100						
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2102010200						
b. Deposito	2102020100						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2102020200						
Simpanan dari Bank Lain	2103010000						
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2103020000						
Pinjaman yang Diterima	2201010000						
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2201020000						
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	2201030000						
Dana Setoran Modal - Kewajiban	2202000000						
Liabilitas Antarkantor	2203000000						
Liabilitas Lainnya	2299000000						
Total Liabilitas	2000000000						
EKUITAS							
Modal Disetor							
a. Modal Dasar	3101010000						
b. Modal yang Belum Disetor -/-	3101020000						
Tambahan Modal Disetor							
a. Agio (Disagio)	3102010000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
b. Modal Sumbangan	3102020000						
c. Dana Setoran Modal – Ekuitas	3102030000						
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	3102990000						
Ekuitas Lain							
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	3103010000						
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	3103020000						
c. Lainnya	3103990000						
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	3103980000						
Cadangan							
a. Umum	3104010000						
b. Tujuan	3104020000						
Laba (rugi)							
a. Tahun-tahun Lalu	3105010000						
b. Tahun Berjalan	3105020000						
Total Ekuitas	3000000000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS							

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

^a bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi laporan posisi keuangan, antara lain proyeksi inflasi daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat bunga simpanan, tingkat bunga kredit, dan/atau lainnya).

b. Format Proyeksi Laporan Laba Rugi

Format 03.20
Proyeksi Laporan Laba Rugi

(dalam satuan rupiah)

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
Pendapatan Operasional	4100000000						
1. Pendapatan Bunga							
a. Bunga Kontraktual							
i. Surat Berharga	4101010100						
ii. Penempatan pada Bank Lain							
Giro	4101010201						
Tabungan	4101010202						
Deposito	4101010203						
Sertifikat Deposito	4101010204						
iii. Kredit yang Diberikan							
Kepada Bank Lain	4101010301						
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101010302						
b. Provisi Kredit							
i. Kepada Bank Lain	4101020100						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101020200						
c. Biaya Transaksi -/-							
i. Surat Berharga	4101030100						
ii. Kredit yang Diberikan							
Kepada Bank Lain	4101030201						
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101030202						
d. Koreksi atas Pendapatan Bunga -/-	4101040000						
2. Pendapatan Lainnya							
a. Pendapatan Jasa Transaksi	4102010000						
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	4102020000						
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	4102030000						
d. Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku	4102040000						
e. Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	4102050000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
f. Lainnya	4102990000						
Beban Operasional	5100000000						
1. Beban Bunga							
a. Beban Bunga Kontraktual							
i. Tabungan	5101010100						
ii. Deposito	5101010200						
iii. Simpanan dari bank Lain	5101010300						
iv. Pinjaman yang Diterima							
1) Dari Bank Indonesia	5101010401						
2) Dari Bank Lain	5101010402						
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	5101010403						
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	5101010404						
v. Lainnya	5101019900						
b. Biaya Transaksi							
i. Kepada Bank Lain	5101020100						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5101020200						
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	5102000000						
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif							
a. Surat Berharga	5103010000						
b. Penempatan pada Bank Lain	5103020000						
c. Kredit yang Diberikan							
i. Kepada Bank Lain	5103030100						
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5103030200						
4. Beban Pemasaran	5104000000						
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	5105000000						
6. Beban Administrasi dan Umum							
a. Beban Tenaga Kerja							
i. Gaji dan Upah	5106010100						
ii. Honorarium	5106010200						
iii. Lainnya	5106019900						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	5106020000						
c. Beban Sewa							
i. Gedung Kantor	5106030100						
ii. Lainnya	5106039900						
d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	5106040000						
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5106050000						
f. Beban Premi Asuransi	5106060000						
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	5106070000						
h. Beban Barang dan Jasa	5106080000						
i. Pajak-Pajak	5106090000						
7. Beban Lainnya							
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	5199010000						
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	5199020000						
c. Lainnya	5199990000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
Laba (Rugi) Operasional	3104040100						
Pendapatan Nonoperasional	4200000000						
1. Keuntungan Penjualan							
a. Aset Tetap dan Inventaris	4201010000						
b. AYDA	4201020000						
2. Pemulihan Penurunan Nilai							
a. Aset Tetap dan Inventaris	4202010000						
b. AYDA	4202020000						
3. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	4203000000						
4. Bunga Antarkantor	4204000000						
5. Selisih Kurs	4205000000						
6. Lainnya	4299000000						
Beban Nonoperasional	5200000000						
1. Kerugian Penjualan/ Kehilangan							
a. Aset Tetap dan Inventaris	5201010000						
b. AYDA	5201020000						
2. Kerugian Penurunan Nilai							

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
a. Aset Tetap dan Inventaris	5202010000						
b. AYDA	5202020000						
3. Bunga Antarkantor	5203000000						
4. Selisih Kurs	5204000000						
5. Lainnya	5299000000						
Laba (Rugi) Nonoperasional	3104040200						
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3104040300						
Taksiran Pajak Penghasilan	5300000000						
Pendapatan Pajak Tangguhan	4400000000						
Beban Pajak Tangguhan	5400000000						
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3104040400						
Penghasilan Komprehensif Lain							
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi							
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	7101010000						
b. Lainnya	7101990000						
c. Pajak Penghasilan Terkait	7101980000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
2. Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi							
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	7102010000						
b. Lainnya	7102990000						
c. Pajak Penghasilan Terkait	7102980000						
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	3104040500						
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3104040600						

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

^a bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi laba rugi, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat bunga simpanan, tingkat bunga kredit, dan/atau lainnya).

c. Format Proyeksi Rekening Administratif

Format 03.30
Proyeksi Rekening Administratif

(dalam satuan rupiah)

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
Tagihan Komitmen							
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	6101010000						
b. Tagihan Komitmen Lainnya	6101990000						
Kewajiban Komitmen							
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	6102010000						
b. Penerusan Kredit	6102020000						
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	6102990000						
Tagihan Kontinjensi							
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian							
1) Bunga Kredit yang Diberikan	6201010100						
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	6201010200						
b. Aset Produktif yang Dihapus Buku							

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
1) Kredit yang Diberikan	6201020100						
2) Penempatan pada Bank Lain	6201020200						
3) Pendapatan Bunga atas Kredit yang Dihapus Buku	6201020300						
4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang Dihapus Buku	6201020400						
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	6201030000						
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	6201990000						
Kewajiban Kontinjensi	6202000000						
Rekening Administratif Lainnya	6900000000						

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

^a bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi rekening administratif, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat bunga simpanan, tingkat bunga kredit, dan/atau lainnya).

4. Target Rasio dan Pos Keuangan

Bagian ini berisi penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif mengenai target rasio keuangan pokok dan target rasio pos tertentu lainnya, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan target rasio dan pos keuangan.

Target rasio keuangan pokok antara lain rasio yang dapat memberikan informasi untuk penilaian tingkat kesehatan BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Target rasio pos tertentu lainnya antara lain:

- a. rasio kredit usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah terhadap total kredit;
- b. rasio dana pendidikan dan pelatihan terhadap total beban tenaga kerja tahun sebelumnya;
- c. rasio realisasi dana pendidikan dan pelatihan terhadap total dana pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan;
- d. rasio AYDA terhadap total kredit; dan
- e. rasio realisasi penyelesaian AYDA terhadap AYDA.

Penyusunan target rasio dan pos keuangan sebagai berikut:

- a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.

Proyeksi target rasio dan pos keuangan dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
- 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.

- b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi target rasio dan pos keuangan dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- 4) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Penyusunan proyeksi target rasio dan pos keuangan sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 04.00
Target Rasio dan Pos Keuangan

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
A. Rasio Keuangan Pokok							
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (%) ^b	0421110						
a. Modal (Rp)	0421111						
b. ATMR (Rp)	0421112						
Rasio Modal Inti terhadap Keseluruhan Modal (%) ^b	0421120						
a. Modal Inti (Rp)	0421121						
b. Modal (Rp)	0421122						
Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif yang Bermasalah (%) ^c	0421130						
a. Modal Inti (Rp)	0421131						
b. Aset Produktif yang Bermasalah (Rp)	0421132						
Rasio Kualitas Aset Produktif (KAP) (%) ^c	0421210						
a. Aset Produktif yang Diklasifikasikan (Rp)	0421211						
b. Total Aset Produktif (Rp)	0421212						
Rasio Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (%) ^c	0421220						
a. PPAP (Rp)	0421221						

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
b. PPAP yang Wajib Dibentuk (Rp)	0421222						
Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Neto (%) ^d	0421230						
a. Total Kredit yang Bermasalah dikurangi dengan PPAP (Rp)	0421231						
b. Total Kredit (Rp)	0421232						
Rasio NPL Gross (%) ^d	0421240						
a. Total Kredit yang Bermasalah (Rp)	0421241						
b. Total Kredit (Rp)	0441242						
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif (%) ^e	0421250						
a. Total Kredit (Rp)	0421251						
b. Total Aset Produktif (Rp)	0421252						
Rasio <i>Return on Assets</i> (ROA) (%) ^c	0421310						
a. Laba sebelum Pajak (Rp)	0421311						
b. Rata-rata Total Aset (Rp)	0421312						
Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM) (%) ^c	0421320						
a. Pendapatan Bunga Bersih (Rp)	0421321						
b. Rata-rata Total Aset Produktif (Rp)	0421322						
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%) ^c	0421330						
a. Total Beban Operasional (Rp)	0421331						
b. Total Pendapatan Operasional (Rp)	0421332						
<i>Cash Ratio</i> (CR) (%) ^c	0421410						
a. Aset Likuid (Rp)	0421411						

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
b. Hutang Lancar (Rp)	0421412						
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) (%) ^c	0421420						
a. Total Kredit (Rp)	0421421						
b. Total Dana yang Diterima (Rp)	0421422						
Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset (%) ^e	0421430						
a. Aset Likuid (Rp)	0421431						
b. Total Aset (Rp)	0421432						
B. Rasio Pos Tertentu Lainnya							
Rasio Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Kredit (%) ^f	0422100						
a. Total Kredit UMKM (Rp)	0422110						
b. Total Kredit (Rp)	0422120						
Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan							
Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Total Beban Tenaga Kerja Tahun Sebelumnya (%) ^g	0422210						
a. Total Dana Pendidikan dan Pelatihan (Rp)	0422211						
b. Total Beban Tenaga Kerja Tahun Sebelumnya (Rp)	0422212						
Rasio Realisasi Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Total Dana	0422220						

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 ^a	Des X+2 ^a
Pendidikan dan Pelatihan yang Dianggarkan (%) ^g							
a. Realisasi Dana Pendidikan dan Pelatihan (Rp)	0422221						
b. Total Dana Pendidikan dan Pelatihan yang Dianggarkan (Rp)	0422222						
Rasio AYDA terhadap Total Kredit (%) ^h	0422300						
a. AYDA (Rp)	0422310						
b. Total Kredit (Rp)	0422320						
Rasio Realisasi Penyelesaian AYDA terhadap AYDA (%) ^h	0422400						
a. Realisasi Penyelesaian AYDA (Rp)	0422410						
b. AYDA (Rp)	0422420						

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

^a bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

^b penjelasan rasio sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.

^c penjelasan rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

^d penjelasan rasio sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

^e penjelasan rasio sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.

^f penjelasan kredit UMKM adalah kredit kepada debitur yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

- g penjelasan mengenai dana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- h penjelasan AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat.

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan target rasio dan pos keuangan, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat bunga simpanan, tingkat bunga kredit, dan/atau lainnya).

5. Rencana Penghimpunan Dana

Bagian ini berisi penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana penghimpunan dana pihak ketiga dan rencana penghimpunan dana lainnya, sebagai berikut:

- a. Rencana penghimpunan dana pihak ketiga antara lain informasi mengenai target, strategi pemasaran, dan sumber penghimpunan tabungan dan deposito.
- b. Rencana penghimpunan dana lainnya antara lain informasi mengenai target, strategi penerimaan, dan sumber penerimaan pinjaman dari bank lain dan/atau pinjaman yang tidak berasal dari bank.

Penyusunan rencana penghimpunan dana sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 05.00

Rencana Penghimpunan Dana

Kolom	Sandi	Uraian
Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	0510	
Rencana Penghimpunan Dana Lainnya	0520	

6. Rencana Penyaluran Dana

Bagian ini berisi penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit, rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan, dan rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha.

Proyeksi rencana penyaluran dana dijelaskan untuk:

- a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
- c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana

dimaksud serta strategi BPR untuk merealisasikan rencana tersebut.

Rencana penyaluran dana paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

a. Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Kredit

Rencana penyaluran kredit disajikan berdasarkan sektor ekonomi terbesar yaitu paling banyak pada 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase penyaluran kredit terbesar dari total portofolio penyaluran kredit BPR. Rincian sektor ekonomi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

Penyusunan rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 06.10

Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Kredit

(dalam satuan rupiah)

Sektor Ekonomi	Baki Debet Okt (X-1)	Proyeksi		
		Des X-1	Jun X	Des X
Jumlah				

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan dan Strategi:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit).

b. Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Rencana penyaluran kredit disajikan berdasarkan jenis penggunaan yang meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi sesuai dengan Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

Penyusunan rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 06.20

Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

(dalam satuan rupiah)

Jenis Penggunaan	Sandi	Baki Debet Okt (X-1)	Proyeksi		
			Des X-1	Jun X	Des X
Modal Kerja	0621				
Investasi	0622				
Konsumsi	0623				
Jumlah	0620				

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan dan Strategi:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan).

- c. Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha
Pengelompokan jenis usaha yang meliputi usaha UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penyusunan rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 06.30
Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan
Jenis Usaha

(dalam satuan rupiah)

Jenis Usaha	Sandi	Baki Debet Okt (X-1)	Proyeksi		
			Des X-1	Jun X	Des X
Usaha Mikro	0631				
Usaha Kecil	0632				
Usaha Menengah	0633				
Jumlah	0630				

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan dan Strategi:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha).

7. Rencana Permodalan

Bagian ini berisi penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka menengah mengenai rencana perubahan atau penambahan modal disetor, modal sumbangan, dan/atau revaluasi aset tetap. Termasuk dalam rencana permodalan yaitu strategi dan informasi mengenai perubahan atau penambahan modal.

Rencana permodalan dijelaskan untuk:

- a. posisi aktual akhir bulan Oktober penyusunan Rencana Bisnis;
- b. rencana akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- c. rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- d. rencana akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Penyusunan rencana permodalan sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 07.00
Rencana Permodalan

Jenis Modal (Sandi) ^a	Nama Pemegang Saham	Kinerja Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1	Des X+2

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

^a Diisi dengan sandi 10 untuk modal disetor, sandi 21 untuk modal sumbangan dan/atau sandi 25 untuk revaluasi aset tetap

Strategi dan Informasi:

(Diisi dengan strategi dan informasi mengenai perubahan atau penambahan modal).

8. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bagian ini berisi penjelasan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar dan rencana pengembangan sumber daya manusia yang paling sedikit memuat rencana rekrutmen sumber daya manusia, rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.

a. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar

Rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 08.10

Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar

Jenis Rencana (Sandi)^a	Uraian	Alamat

Keterangan:

^a Diisi dengan sandi:

- 01 untuk perubahan aplikasi inti perbankan;
- 02 untuk perubahan signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti perbankan;
- 03 untuk pemindahan pusat data;
- 04 untuk pemindahan pusat pemulihan bencana;
- 05 untuk kerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan/atau
- 06 untuk pengembangan teknologi informasi mendasar lainnya.

b. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain meliputi rencana rekrutmen sumber daya manusia pada BPR, rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya, sebagai berikut:

1) Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Bagian ini berisi penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif mengenai rencana rekrutmen sumber daya manusia.

Penyusunan rencana rekrutmen sumber daya manusia sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 08.21

Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Bidang Tugas (Sandi)^a	Target Waktu Pelaksanaan (Sandi)^b	Jumlah Pegawai yang Direkrut^c	Biaya^d

Keterangan:

- ^a Diisi dengan sandi:
101 untuk pemasaran;
102 untuk teknologi informasi;
103 untuk audit internal;
104 untuk pembukuan;
105 untuk layanan nasabah;
106 untuk kasir; dan/atau
199 untuk lainnya.
- ^b Diisi dengan sandi:
01 untuk triwulan 1;
02 untuk triwulan 2;
03 untuk triwulan 3; atau
04 untuk triwulan 4.
- ^c Diisi dengan satuan.
- ^d Diisi dengan satuan rupiah.

2) Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 08.22
Rencana Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Daya Manusia

Bidang atau Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (Sandi) ^a	Target Waktu Pelaksanaan (Sandi) ^b	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Diikutsertakan ^c	Biaya dan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ^d

Keterangan:

- ^a Diisi dengan sandi:
101 untuk sertifikasi Direksi;
102 untuk sertifikasi Dewan Komisaris;
103 untuk perkreditan;
104 untuk manajemen risiko;
105 untuk pelatihan teknologi informasi;
106 untuk pembukuan;
107 untuk manajemen sumber daya manusia;
108 untuk sertifikasi ISO;
109 untuk pelatihan audit;
199 untuk lainnya;
201 untuk pelayanan prima;
202 untuk *problem solving*;
203 untuk manajemen waktu;
204 untuk *leadership*;
205 untuk *financial planning*; dan/atau
299 untuk lainnya.
- ^b Diisi dengan sandi:
01 untuk triwulan 1;
02 untuk triwulan 2;
03 untuk triwulan 3; atau
04 untuk triwulan 4.
- ^c Diisi dengan satuan.
- ^d Diisi dengan satuan rupiah.

3) Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap.

Penyusunan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 08.23

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

Bidang Tugas (Sandi)^a	Alasan Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya^b	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya

Keterangan:

- ^a Diisi dengan sandi:
101 untuk petugas kebersihan;
102 untuk pesuruh;
103 untuk penagih utang;
104 untuk pemasaran;
105 untuk tenaga pengamanan;
106 untuk layanan nasabah;
107 untuk kasir;
108 untuk teknisi; dan/atau
199 untuk lainnya.
- ^b Diisi dengan satuan.

9. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru

Bagian ini berisi penjelasan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan usaha BPR mencakup produk dan aktivitas BPR yang dijelaskan untuk periode jangka pendek yang memenuhi kategori produk baru sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan produk BPR dan BPRS.

Rencana pelaksanaan kegiatan usaha memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.

Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 09.00

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru

Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Mekanisme Penyelenggaraan (Sandi) ^a	Deskripsi Umum	Waktu Pelaksanaan (Sandi) ^b	Manfaat		Kebutuhan Biaya Investasi		Keterkaitan dengan Strategi Bisnis BPR	Risiko yang Melekat ^c	Mitigasi Risiko
				Bagi BPR	Bagi Nasabah	CAPEX	OPEX Tahun Pertama			

Keterangan:

- ^a Diisi dengan sandi:
 - 1 untuk pelaporan;
 - 2 untuk persetujuan;
 - 3 untuk uji coba terbatas; dan/atau
 - 4 untuk *instant approval*.
- ^b Diisi dengan sandi:
 - 01 untuk triwulan 1;
 - 02 untuk triwulan 2;
 - 03 untuk triwulan 3; dan/atau
 - 04 untuk triwulan 4.
- ^c Penjelasan uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

10. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
- Bagian ini berisi penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang, rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor cabang, dan rencana perubahan status jaringan kantor. Penjelasan kantor cabang dan perubahan status jaringan kantor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat. Penyusunan rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 10.00

Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Jenis Rencana (Sandi) ^a	Jaringan Kantor (Sandi) ^b	Rencana Waktu Pelaksanaan (Sandi) ^c	Perkiraan Investasi/Biaya ^d	Lokasi		Alasan dan Pertimbangan ^e
				Kab/Kota	Alamat Lengkap	

Keterangan:

- ^a Diisi dengan sandi:
 - 1 untuk pembukaan;
 - 2 untuk pemindahan alamat;
 - 3 untuk peningkatan status;
 - 4 untuk penurunan status; dan/atau
 - 5 untuk penutupan.
- ^b Diisi dengan sandi:
 - 1 untuk kantor pusat;
 - 2 untuk kantor cabang;
 - 3 untuk kantor kas menjadi kantor cabang; dan/atau
 - 4 untuk kantor cabang menjadi kantor kas.
- ^c Diisi dengan sandi:
 - 01 untuk triwulan 1;
 - 02 untuk triwulan 2;
 - 03 untuk triwulan 3; dan/atau
 - 04 untuk triwulan 4.
- ^d Diisi dengan satuan rupiah.
- ^e Penjelasan uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

11. Informasi Lainnya

Bagian ini berisi penjelasan mengenai informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR antara lain rencana penghentian kegiatan usaha, produk, atau aktivitas yang berdampak material terhadap kinerja keuangan atau profil risiko BPR, termasuk informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis.

Informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis antara lain:

- a. rencana literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat;
- b. rencana penyelenggaraan edukasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan; dan
- c. rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Penyusunan informasi lainnya dilakukan dengan mengunggah dokumen dalam bentuk pdf pada Format 99.00 Informasi Lainnya.

B. Persetujuan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Rencana Bisnis yang telah disusun oleh Direksi wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. BPR mengunggah dokumen dalam bentuk pdf pada Format 99.01 Lembar Persetujuan Dewan Komisaris.

II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

Sesuai dengan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, BPR wajib menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama. Dalam hal tidak terdapat direktur utama dan komisaris utama, laporan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR. BPR mengunggah dokumen dalam bentuk pdf pada Format 01.00 Lembar Pernyataan.

Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis berisi penjelasan secara kualitatif mengenai:

- a. pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi serta menguraikan fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis, paling sedikit memuat:
 - 1) strategi bisnis dan kebijakan;
 - 2) realisasi kinerja keuangan pada laporan posisi keuangan, laba rugi, rekening administratif, serta rasio dan pos keuangan;
 - 3) realisasi penghimpunan dana;
 - 4) realisasi penyaluran dana;
 - 5) realisasi permodalan;
 - 6) realisasi pengembangan dan pengadaan teknologi informasi, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - 7) realisasi pelaksanaan kegiatan usaha baru;
 - 8) realisasi pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
 - 9) realisasi informasi lainnya;
- b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara Rencana Bisnis dan realisasi Rencana Bisnis;
- c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
- d. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi, termasuk hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif

dan penyisihan penghapusan aset produktif bagi bank perkreditan rakyat; dan

- e. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 02.00

Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis

Kolom	Sandi	Uraian
a. Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis paling sedikit: 1) strategi bisnis dan kebijakan; 2) realisasi kinerja keuangan pada laporan posisi keuangan, laba rugi, rekening administratif, serta rasio dan pos keuangan; 3) realisasi penghimpunan dana; 4) realisasi penyaluran dana; 5) realisasi permodalan; 6) realisasi pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan SDM; 7) realisasi pelaksanaan kegiatan usaha baru; 8) realisasi pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan 9) realisasi informasi lainnya.	0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109	
b. Penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara Rencana Bisnis dengan realisasi Rencana Bisnis	0200	
c. Upaya tindak lanjut untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis: 1) yang telah dilakukan; dan 2) yang akan dilakukan.	0301 0302	
d. Hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap	0400	

Kolom	Sandi	Uraian
pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi.		
e. Langkah pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis: 1) yang telah ditempuh; dan 2) yang akan ditempuh.	0501 0502	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja